Pidato Sambutan Ki Hadjar Dewantara. Dewan Senat Universitas Gadjah Mada, 7 November 1956

Saudara Ketua Sidang Senat Terbuka!

Perkenankan saya membuka kata sambutan kami ini dengan ucapan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada Dewan Senat Universitas, yang dalam sidangnya tanggal 7 November 1956 telah memutuskan akan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada kami.

Ucapan terima kasih itu saya tujukan pula kepada Saudara Prof. Dr. Sardjito yang selaku Presiden Universitas telah berhasil mengumpulkan berbagai unsur, yang dianggap cukup penting, untuk dipakai sebagai dasar atau alasan guna mempertanggungjawabkan Senat tersebut.

Saudar Ketua!

Dari pidato Prof. Sardjito, yang penting ringkas dan tegas itu, dapatlah saya menangkap dua buah kesan utama.

Pertama, beliau tidak saja meninjau objek penyelidikannya secara eksklusif, namun memasukkan pula “penyandera” mengenai pribadi kami ke dalam uraiannya. Kedua, dengan tegas beliau menghubungkan, bahwa menyatukan tiga lapangan pekerjaan kami, yaitu: 1. Perjuangan kemerdekaan nasional, 2. Perjuangan pendidikan dan 3. Pejuang kebudayaan, menjadi satu “tritunggal”.

Mengenai kesan yang pertama, yaitu bahwa disamping pengutaraan dasar-dasar yang pokok serta garis-garis besarnya, Prof. Sardjito masih menganggap perlu menyandera sifat pribadi kami, itu menunjukkan ketelitian beliau dalam menyelidiki soal yang sedang beliau hadapi. Memang kebaikan sifat-sifat dasar serta kebaikan garis-garis besar atau bentuknya ataupun organisasinya, belum menjadi pasti adanya isi serta irama atau cara melaksanakan yang baik. Dalam pada itu harus kita sadari, bahwa “sifat” dan “bentuk” adalah unsur-unsur yang timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan “isi” dan “irama” sangat lekat hubungannya dengan zamannya dan pribadinya seseorang yang bersangkutan empat ukuran ini, S.B.I (Sifat, Bentuk, Isi dan Irama) sungguh perlu dipakai untuk mendapatkan nilai yang lengkap dan benar.

Saudara Ketua!

Cara penilaian dengan memaknai 4 ukuran tersebut, sungguh perlu digunakan, lebih-lebih di zaman sekarang, berhubungan dengan kerapkalinya kita harus menghargai dan menilai anasir-anasir kebudayaan yang datang dari dunia luar, terutama dunia Barat di sini sampailah kita pada saat baik untuk mulai menyinggung-nyinggung soal kebudayaan, yang termasuk dalam kesan yang kedua. Kini kita berada di zaman “akulturasi” atau pertukaran kebudayaan dengan dunia Barat. “Sifat” pokok dari tiap-tiap kebudayaan adalah universal, yang boleh dianggap sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa murah kepada makhluk manusia untuk mempertinggi hidup dan penghidupannya. Adapun “bentuk” dari kebudayaan tadi terjadi karena pengaruh kodrat alam, yang di dunia ini berlain-lainan macam dan rupanya. Adapun “isi” zaman itu tidak lain daripada waktu yang ditempati masyarakat, yang biasanya menunjukkan sifat-sifat dan corak warna hidup kejiwaan yang agak khusus dan yang terus menerus berganti-ganti isinya. Akhirnya tentang “irama” yang harus dipahami bahwa cara menggunakan segala unsur kebudayaan itu menjadi tanggung jawab tiap-tiap orang atau masyarakat yang berpribadi.

Adapun semboyan yang mengandung filsafat dalam soal akulturasi yang telah kita masukan dalam rangkain asas-asas ke-Tamansiswaan-an. Yaitu “Asas Tir-con” yang mengajarkan, bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus *kontinuitas* dengan alam kebudayaannya sendiri, lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat “Bhineka Tunggal Ika”

Dalam keterangan tentang sifat dan dasar di atas, istilah “bentuk” ini saya gambarkan sebagai “organisasi”. Dalam hal ini haruslah kita ingati, bahwa tiap-tiap organisasi, agar bermanfaat, harus bersifat “organis” yang berarti hidup, jangan sampai suatu bentuk organisasi menghalangi-halangi terlaksananya kenyataan-kenyataan yang menjadi tujuan organisasi itu. Memang benar organisasi perlu untuk tata tertibnya keadaan lahir, akan tetapi jangan organisasi itu bertentangan dengan hakekatnya suatu kenyataan. Ingatlah saya akan suatu pelajaran yang dipentingkan dalam filsafat Islam, yang berbunyi “Syari’at tidak dengan hakikat adalah kosong” sebaliknya “Hakikat tidak dengan syari’at adalah batal”.

Dengan sendiri teringatlah saya akan petuah suci, berasal dari Sultan Agung Mataram, yang terkenal sebagai Aulia, sebagai Pujangga dan Pemimpin Negara di abad yang ke-17. Menurut Sultan Agung, kalau syari’at sembahyang tidak dituntun oleh kesucian jiwa (yang disebut *gending* olehnya), maka batallah sholatnya orang terhadap Yang Maha Kuasa. Tak ada perlunya orang memelihara hidup kebatinan, jika tidak berisikan pengluhuran Zat Allah Yang Maha Kuasa.

Bagi mereka yang ingin mengetahui wejangan Sang Sultan Agung mengenai hal tersebut, baiklah disini saya sajikan naskah yang orisinil, terkutip dari *Serat Sastra Gending* ciptaanya.

*Pramila gending yen bubrah,
Gugur sembahe mringi Widdhi,
Batal wisesaning salat,
Tanpa gawe ulah gending,
Denge ngran tembang gending:
Tuk ireng swara linuhung,
Amuji asamaning Zat,
Swara saking osik wadhi,
Osik mulya wentaring cipta surasa*

Saudara Ketua!

Dalam pidatonya maka Prof. Sardjito menyatakan, bahwa hidup dan pekerjaan kami menunjukkan banyak facet-facetnya, yang tidak memudahkan bagi Senat untuk memilih keilmuan gelar apa yang akan disajikan. Ada yang menitikberatkan pengharapannya kepada keahlian kami dalam soal “Pendidikan”, karena menurut Prof. Sardjito yang sekarang dilihat oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang sungguh besar, ekstensif dan intensif, ialah dilangsungkan perguruan Tamansiswa. Sebaliknya ada yang beranggapan, bahwa hal itu hanya mengenai satu facet saja dan dengan sendirinya dianggap belum cukup. Akhirnya oleh Dewan Senat ditetapkan, bahwa pengharapan serta penilaian terhadap apa yang oleh Prof. Sardjito disebut “jasa-jasa” kami, ialah dengan memandang pribadi kami sebagai perintis kemerdekaan nasional, perintis Pendidikan nasional dan perintis kebudayaan nasional.

Saya sendiri dapat memahami sepenuhnya apa yang dinyatakan oleh Dewan Senat itu. Bahkan kami dapat membenarkan pula penilaian tersebut. Bahkan kami dapat membenarkan

pula penilaian tersebut. Seperti berulang-ulang telah saya nyatakan sendiri, Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Dalam pada itu, sudah pada waktu berdirinya Tamansiswa saya beranggapan (dan ini tidak disinggung-singgung oleh Prof. Sardjito), bahwa kemerdekaan nusa dan bangsa untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan rakyat, tidak mungkin tercapai hanya dengan jalan politik. Terhadap pergerakan politik, orang tahu akan gambaran khayal kami, yang kerap kali juga sudah kami jelaskan, bahwa untuk dapat bekerja di sawah dan ladang dengan tentram dan seksama (yakni tugas cara pendidik dan para pejuang kebudayaan) sangat kita perlukan adanya pagar yang kokoh dan kuat, untuk menolak segala bahaya yang mengancam dari segala kekuasaan dan kekuatan yang mungkin dapat merusak sawah dan ladang serta tanaman-tanamannya, yang kita pelihara. "Pagar" tadi tidak bukan dan tak lain adalah pergerakan politik rakyat kita. Itulah sebabnya selalu adanya hubungan yang baik dan erat antara pergerakan pendidikan dan kebudayaan Tamansiswa dengan pergerakan politik.

Ada satu hal di dalam pidato Prof. Sardjito yang perlu kami beri sedikit penjelasan. Saudara Sardjito menganggap "aneh" bahwa dari pemimpin-pemimpin kita sekarang ini sebagian terbesar adalah buah dari pendidikan dan pengajaran di zaman Belanda itu, namun begitu toh tidak dapat dikatakan, bahwa mereka itu terasing dari dan kehilangan dasar-dasar nasionalnya.

Saudara Ketua!

Dalam hal ini harus kita insyafi, bahwa para penguasa bangsa Belanda di Indonesia sebenarnya sama sekali tidak memperhatikan soal pendidikan kebudayaan. Mereka semata-mata mementingkan pengajaran, yang intelektualitas serta materialistis, karena pendidikan di situ semata-mata berupa pendidikan intelek. Dalam keadaan yang sedemikian, anak-anak dan pemuda-pemuda kita, yang di rumah keluarganya, masih dapat mengecap suasana kultural tetap mendapatkan pengaruh dari segala apa yang terus hidup di dalam berbagai tradisi kebudayaan, sekalipun dalam lapangan ini belum ada pendidikan yang modern. Keuntungan dari keadaan tersebut ialah, bahwa banyak pemimpin-pemimpin di zaman sekarang itu tidak terasing atau kehilangan dasar-dasar nasionalismenya. Ini bukan barang "aneh", sebaliknya hal yang "logis" yang dapat dimengerti, hal biasa, hal yang semestinya. Saya sendiri adalah produk dari pendidikan dan pengajaran Barat, karena di waktu kecil saya belum ada perguruan nasional. Semoga soal ini kita perhatikan secukupnya, yaitu bahwa disamping pendidikan kecerdasan pikiran harus ada pendidikan yang kultural. Jangan sampai kita hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan, seperti yang kita alami di zaman Belanda, dengan pendidikannya yang intelektualis, materialise dan kolonial itu.

Baiklah di sini kita sadari, bawah pendidikan dan pengajaran secara Barat tidak boleh mutlak kita anggap jelek. Banyak ilmu pengetahuan yang harus kita kejar, sekalipun dengan melalui sekolah-sekolah Barat. Kita mengerti, bahwa juga di Indonesia kini masih banyak pendidikan dan pengajaran yang dilakukan secara sistem Barat. Ini tidak mengapa, asalkan kepada anak-anak kita diberi pendidikan kultural dan nasional, yang semua-semuanya kita tujukan ke arah keluhuran manusia, nusa dan bangsa, tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Untuk dapat mencapai tujuan ini cukuplah di sini saya nasehatkan: didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita, dengan adat istiadatnya yang dalam hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga.

Tentang pengertian “keluarga” yang baru saja saya singgung sebagai lingkungan yang melindungi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak dalam hidup kebudayaannya, perlulah di sini diketahui, bahwa di dalam sistem Tamansiswa hidup keluarga itu mendapat tempat yang luhur dan istimewa. Sebagai masyarakat yang paling kecil namun yang paling suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya, lingkungan keluarga itu merupakan suatu pusat pendidikan yang termulia. Cinta kasih, semangat tolong-menolong, rasa kewajiban berkorban dan ikut bertanggungjawab dan lain-lain, pendek kata segala unsur-unsur dari budi sosial dan kesusilaan dalam sifat-sifat pokoknya terdapat di dalam hidup keluarga. Selain itu, seperti sudah disinggung di atas, lingkungan keluarga inilah yang meneruskan segala tradisi, baik yang mengenai hidup kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain-lain unsur daripada budi kesusilaan. Berpisahannya anak-anak dengan keluarganya berarti kehilangan tuntunan ataupun pedoman, untuk laku hidupnya dan membahayakan keselamatan dan kebahagiaannya sebagai manusia yang susila dan bertanggungjawab. Tak usah saya jelaskan di sini, bahwa menurut statistik secara modern dapat dibuktikan, bahwa kejahatan-kejahatan kriminal sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hidup kekeluargaan dan atau berasal dari keluarga yang rusak kesusilaannya. Semoga hal yang amat penting ini jangan dilupakan oleh pemimpin-pemimpin perguruan kita di Indonesia.

Nasehat-nasehat serupa yang saya ucapkan itu adalah perlu, karena sudah sejak lama rakyat kita boleh dikata keputusan tradisi. Kita tidak tahu lagi bagaimana sifat dan bentuk serta isi dan irama pendidikan dan pengajaran di zaman dahulu kala. Rakyat kita sekarang berhasrat besar untuk mengadakan pembangunan, juga di lapangan kebudayaan dan pendidikan. Saya peringatkan di sini, bahwa hingga sekarang kita kenal kebudayaan di zaman dulu. Pujanga-pujangga kita dan Ki Dalang di bawah *blencong* hingga kini masih menceritakan adanya *cantrik*, *cekel*, *manguyu*, *jejanggan*, malah sebutan-sebutan untuk *student-student* putri, seperti *mentrik*, *sontrang*, *dahyang*, *bidang* dan lain-lain. Pula nama-nama untuk guru-guru besarnya, seperti *dwijawara*, *hajar*, *pandita*, *wiku*, *begawan* dan sebagainya. Adanya istilah-istilah itu membuktikan, bahwa di zaman dahulu sudah pernah ada perguruan-perguruan luhur, dengan peraturan-peraturan tata tertib yang berdiferensiasi, dimana terbukti para wanita diperbolehkan mengikuti pelajaran di pawiyatan-pawiyatan luhur. (Barang tentu kita semua tahu, bahwa di Nederland misalnya, di zaman serratus tahun yang lalu, kaum perempuan dilarang menjadi *student*. Dr. Aletta H. Jacobs almarhum, yang pernah hidup di zaman kita ini, adalah *student* perempuan yang untuk pertama kali diperbolehkan mengikuti perguruan tinggi, sampai menempuh ujian terakhir dan memperoleh derajat “medika”).

Yang saya utarakan ini adalah termasuk pengetahuan “spekulatif” tetapi cukup penting kira saya untuk diselidiki secara ilmiah “positif” oleh para ahli sejarah dan kebudayaan kita.

Saya mempunyai keyakinan, Saudara Ketua, bahwa seandainya bangsa kita tidak keputusan naluri atau tradisi, tidak kehilangan “garis kontinu” dengan zaman lampau, maka sistem pendidikan dan pengajaran di negeri kita, yang sekarang sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, di zaman yang kita tempati sekarang ini, pasti akan mempunyai bentuk serta isi dan irama, yang lain daripada yang kita lihat sekarang; mulai di taman kanak-kanak sampai di universitas-universitas. Saya mengerti, bahwa bentuk, isa dan irama yang kita dapati di zaman sekarang ini, baik yang menjadi milik badan-badan perguruan partikelir maupun yang dipelihara oleh Kementerian P.P dan K, pada umumnya masih merupakan *doordruk* (sekalipun *doordruk* yang sudah dikoreksi di sana-sini) dari sekolah-sekolah yang terpakai dalam sistem Belanda. Malah kadang-kadang masih nampak juga, sekalipun suram-suram, tendens-tendens yang materialistis dan . . . kolonial.

Saya mengerti, Saudara Ketua, bahwa rakyat kita merasa wajib, segera atau dalam waktu yang singkat melakukan pembangunan di lapangan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi tidak ada contoh-contoh yang positif, yang lebih baik dan cepat kita tiru. Kita lihat di zaman sekarang masih dipakainya bentuk-bentuk rumah sekolah, daftar-daftar pelajaran yang tidak cukup memberi semangat mencari ilmu pengetahuan sendiri, karena tiap-tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap tahun pelajar-pelajar kita terus terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar belajar dengan tenang, karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya; sebaliknya, mereka belajar untuk dapat nilai-nilai yang tinggi dalam rapor sekolah-nya atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini sebaliknya lah kita para pemimpin perguruan, bersama-sama dengan Kementerian P.P. dan K. mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit *examen cultus* dan *diploma jacht* itu.

Saudara Ketua, saya sendiri sebagai pemimpin perguruan menyadari, bahwa maksud-maksud yang baik dari para perintis acapkali gagal, tidak berdaya untuk mempengaruhi masyarakat yang sudah terlanjur dalam batinnya terikat oleh bentuk, isi dan irama yang ada di dalam sistem-sistem pendidikan dan pengajaran secara Barat, sekalipun masyarakat tadi insaf benar-benar, bahwa peserta didik pendidikan Barat tersebut sebenarnya tidak cocok dengan kebutuhan hidup kita, baik lahir maupun batin. Syukurlah sejak tercapainya kemerdekaan nusa dan bangsa kita, tampak adanya keinginan, kehendak, bahkan hasrat dari berbagai golongan rakyat, untuk memperbaiki segala apa yang tidak atau kurang beres itu. Syukurlah pula, bahwa Kementerian P.P. dan K. kita, yang berturut-turut dipimpin oleh orang-orang yang ahli, makin lama makin nampak keinsafannya dan kesadarannya untuk mengadakan berbagai perubahan yang diperlukan.

Saudara Ketua, janganlah sekali-kali orang mengira, bahwa kita harus menolak pengaruh-pengaruh kultural dari dunia luar umumnya, dunia Barat khususnya. Jangan sekali-kali! Sebaliknya janganlah kita memasukan bentuk, isi dan irama dari luar yang tidak perlu. Dalam hal ini kita wajib mewujudkan kepada dunia, bahwa kita cukup bebas dan merdeka serta berdaulat, untuk memilih sendiri segala apa yang kita perlukan. Indonesia bukan Nederland, bukan Inggris, bukan Amerika. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Padang. . . . bukan Amsterdam, Leiden, Utrecht, Groningen, bukan juga London, Cambridge, bukan juga kota-kota universitas Amerika. Memang benar, kita harus meniru segala apa yang baik dari negeri manapun. Ambilah sifat-sifat dasar yang ada di seluruh dunia, yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan nasional kita. Sebaliknya, rakyat kita harus berani, sanggup dan mampu untuk mewujudkan bentuk sendiri, isi sendiri dan irama sendiri, seperti yang layak boleh diharap-harapkan dari bangsa yang telah memasuki dunia internasional, tetapi sebagai bangsa yang berpribadi.

Marilah sekarang kita meninjau secara singkat berturut-turut soal-soal Politik Pendidikan Kolonial zaman V.O.C serta rumusan dalil-dalil mengenai Pendidikan dan Pendidikan Nasional, serta Kebudayaan.

POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL DI ZAMAN VOC DAN HINDIA BELANDA

Pada zaman beralihnya V.O.C (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) menjadi pemerintah "Hindia Belanda", maka sebenarnya sekali-kali tidak ada perubahan sikap dan tindakan terhadap segala urusan tanah air kita. Pada hakekatnya pemerintah HB (Hindia Belanda) merupakan konsolidasi dari segala apa yang tadinya dilakukan oleh VOC tersebut. Baru sesudah nampak adanya kebangunan nasional pada permulaan abad ke-20, bersama waktu dengan mulai tumbuhnya aliran "kolonial modern", yang disebut *ethische koers* atau *ethische*

politiek di Nederland, barulah nampak adanya perubahan dalam sikap pemerintah kolonial. Sayang hanya mengenai beberapa hal; antara lain yang bertali dengan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat, hal mana kini akan kami jelaskan lebih lanjut.

Seperti diketahui maka dalam zaman OIC (*Oost Indische Compagnie*) bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Mencari dan mendapatkan keuntungan materiil yang sebesar-besarnya itulah maksud dan tujuan dari segala usahanya dalam segala lapangan. Tidak lebih dan tidak kurang. Pendidikan dan pengajaran diserahkan sama sekali kepada para pendeta Kristen. Kemudian ada instruksi yang menegaskan, bahwa kepada pihak rakyat hendaknya diberi pengajaran membaca, menulis dan berhitung, akan tetapi hanya seperlunya saja dan melulu untuk mendidik orang-orang pembantu dalam beberapa usahanya. Jadi semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaannya sendiri.

Para zaman Napoleon Bonaparte jatuh kekuasaannya, dan pemerintah Nederland dibentuk kembali (tahun 1816), maka di negeri kita Indonesia oleh pemerintah HB diadakan peraturan-peraturan pemerintah pokok, semacam "Undang-Undang Dasar" (yang disebut *Regeeringsreglement*, singkatan dari *Replacement op het beleid van de Regeering van Nederlands Indie*). Dalam R.R 1818 itu mulai disebut tentang pemeliharaan pengajaran, akan tetapi tidak pernah dilakukan. Pada tahun 1836 diubah dan dalam R.R 1836 tadi sama sekali tidak disebut-sebut lagi tentang pengajaran. Baru dalam R.R 1854 terdapat pasal-pasal yang mengenai pendidikan dan pengajaran. Diantaranya dicantumkan pasal 125 yang berbunyi: *Het openbaar onderwijs vormteen voorwerp van aanhoudende zorg van de gouverneur generaal* (Pengajaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian gubernur-jendral). Ketetapan ini sungguh baik, akan tetapi pasal-pasal berikut berikutnya membuktikan jiwa kolonialnya pemerintah HB. Pasal 126 misalnya menetapkan, bahwa pemberian pengajaran kepada anak-anak bangsa Eropa dibolehkan secara bebas (*Het onderwijs aan Europeanen is vrij*). Pasal 127 berbunyi selengkapnya: *Voldoend openbaar lager onderwijs moet worden gegeven overall, waar de behoefte der Europees bevolking dit vordert en de omstandigheden het toelaten*, yang artinya ialah sedapat-dapatnya harus ada pemberian pengajaran rendah dari pemerintah yang mencukupi kebutuhan penduduk bangsa Eropa.

Teranglah di situ maksudnya: jangan sampai ada anak-anak bangsa Eropa tidak mendapatkan pengajaran. Bagaimanakah sikap pemerintah HB terhadap anak-anak Indonesia? Pasal 128 dalam soal itu menyebutkan: *De goeverneur-generaal zorgt voor de oprichting van scholen tenminste van de Inlandse bevolking*, dan ini berarti untuk rakyat gubernur-jendral disertai untuk mendirikan sekolah-sekolah. Lain tidak; lebih daripada mendirikan pun tidak. Tak ada disebut-sebut di situ tentang keharusan, tentang kebutuhan, tentang perlunya ada usaha yang mencakup dan lain-lain sebagainya.

Pada waktu itu ada beberapa bupati mendirikan "sekolah-sekolah kabupaten", tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian lahir, *Reglement voor het Inlands onderwijs*; lalu didirikan sekolah guru di Sala, yang kemudian pindah ke Magelang, lalu ke Bandung (1866). Dengan berangsur-angsur dapat didirikan "sekolah-sekolah bumiputera", yang hanya mempunyai 3 kelas, sedang gurunya seorang dari *Kweekschool*, dan lain-lainnya (pembantu) berasal dari "sekolah bumiputera" itu juga, sesudah mendapatkan didikan tambahan.

Maksud dan tujuan dari segala usaha itu tetap untuk mendidik calon-calon pegawai negeri dan pembantu-pembantu perusahaan-perusahaan kepunyaan Belanda. Maksud dan tujuan tersebut tidak berubah, ketika pemerintah memberi kelonggaran kepada anak-anak Indonesia, untuk memasuki *Europeesche Lagere School*, karena yang dibolehkan ialah hanya calon-calon peserta didik "dokter Jawa", peserta didik *Hoofden School*. Suatu bukti bahwa

pemerintah Belanda semata-mata mementingkan pendidikan calon-calon pegawai negeri, ialah adanya ujian, yang sangat digemari oleh anak-anak bumiputera, yang disebut *Kleinambtenaarsexamen*.

ZAMAN ETIK DAN KEBANGUNAN NASIONAL

Haluan daripada sistem pendidikan, yang diadakan oleh pihak Belanda seperti tergambar di atas itu, tetapi harus mempengaruhi segala usaha pendidikan. Juga yang dilakukan sesudah aliran *Ethische politiek* atau *Ethische koers* timbul, pada permulaan abad ke-20 (dan sebenarnya sebagai akibat “Kebangunan Nasional” pada permulaan abad ke-20). Haluan tadi boleh digambarkan sebagai haluan “kolonial lunak”, yang dalam sistem pendidikannya tetap menunjukkan sifat “intelektualistis”, pula “individualistis” dan “materialistis”. Sekali-kali tidak mengandung cita-cita kebudayaan. Pada hal pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya harus bersifat pemeliharaan tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa kita sendiri (sesudah menginjak ke dalam zaman “Kebangunan Nasional”) tidak dapat melepaskan diri dari belenggu intelektualisme, individualisme, materialisme dan kolonialisme tadi. Sungguhpun cita-cita Raden Ajeng Kartini (1900) sudah mulai mengandung jiwa nasional dan cita-cita Dokter Wahidin Sudirohusodo (1908) sudah membayangkan aliran kultural namun organisasi teknik pendidikan dan pengajaran tetap tak berubah. Masuknya anasir kebudayaan ke dalam sekolah-sekolah yang bermaksud mewujudkan perguruan kebangsaan, pula masuknya anasir-anasir agama ke dalam sekolah-sekolah Islam, tidak dapat menghapuskan corak warna jiwa kolonial dengan sekaligus.

ZAMAN BANGKITNYA JIWA MERDEKA

Baru pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru, yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tadi seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Idam-idaman kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, itulah pokok sistem pendidikan dan pengajaran, yang pada tahun 1922 dapat tercipta oleh “Tamansiswa” di Yogyakarta. Bahwa aliran Tamansiswa itu sebenarnya sudah terkandung dalam jiwa rakyat di seluruh tanah air kita, adalah terbukti dengan berdirinya perguruan-perguruan Tamansiswa di seluruh kepulauan Indonesia: di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku. Juga sekolah-sekolah yang berdasarkan “keagamaan” (Islam, Kristen, Katolik), asalkan berani berdiri sebagai sekolah partikelir yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda, di samping dasar-dasar keagamaannya masing-masing, memasukan juga dasar dan semangat revolusioner. Dengan begitu, maka gerakan pendidikan berlaku sejalan dengan gerakan politik, dan inilah yang menyebabkan amat banyak orang-orang bekas murid nasional tadi (tidak hanya yang terdidik dalam perguruan Tamansiswa saja) kini secara bermanfaat dan efisien dapat ikut serta dalam segala usaha kenegaraan baik dalam gerakan revolusi maupun dalam usaha pembangunan bangsa dan negara.

TENTANG PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), fikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Karena itulah pasal-pasal di bawah ini harus kita pentingkan:

1. Segala syarat, usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan.

2. Kodratnya keadaan tadi ada tersimpan dalam adat istiadat masing-masing rakyat, yang karenanya tergolong-golong menjadi “bangsa-bangsa” dengan sifatnya perikehidupan sendiri-sendiri, sifat-sifat mana terjadi dari campurnya semua daya upaya untuk mendapatkan hidup tertib damai.
3. Adat istiadat, sebagai sifat daya upaya akan tertibnya damai itu, tiada luput dari pengaruh “zaman” dan “alam” karena itu tidak tetap, akan tetapi senantiasa berubah, bentuk, isi dan iramanya.
4. Akan mengetahui garis hidup yang tetap dari suatu bangsa, perlulah kita mengetahui zaman yang telah lalu, mengetahui menjelmanya zaman itu, ke dalam zaman sekarang, mengetahui zaman yang berlaku ini, lalu dapat insyaAllah kita akan zaman yang akan datang.
5. Pengaruh baru adalah terjadinya dari bergaulnya bangsa yang satu dengan yang lain, pergaulan mana pada sekarang mudah sekali, terbawa dari adanya perhubungan modern. Haruslah kita awas, akan dapat memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita, mana yang merugikan pada kita, dengan selalu mengingatkan bahwa semua kemajuan ilmu pengetahuan dan segala perikehidupan itu adalah kemurahan Tuhan untuk segenap umat manusia di seluruh dunia, meskipun hidupnya masing-masing menurut garis sendiri yang tetap. Jika kita tidak boleh menolaknya.

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya (kultural-nasional) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk*), yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.

Pendidikan budi pekerti harus menggunakan syarat-syarat sesuai dengan ruh kebangsaan, menuju ke arah keluhuran dan kesucian hidup bati, serta ketertiban dan kedamaian hidup lahir; baik syarat-syarat baru yang berfaedah untuk maksud dan tujuan kita.

Teristimewa haruslah kita mementingkan pangkal kehidupan kita yang terus hidup dalam kesenian, peradaban dan keagamaan kita; atau terdapat dalam kitab-kitab cerita (dongeng-dongeng, mite, legenda, babad dan lain-lain). Semua itu adalah “arsip nasional”, dalam mana ada tersimpan berbagai “kekayaan batin” dari bangsa kita. Dengan mengetahui segalanya itu, niscayalah langkah kita menuju ke arah zaman baru akan berhasil tetap dan kekal, karena zaman baru kita “dijodohkan” sebagai “mempelai” dengan zaman yang lalu.

Berhubung dengan apa yang tersebut di atas, perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya dengan perikehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya dapat “pengetahuan” saja tentang hidup rakyatnya, namun juga dapat “mengalami” sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya.

Karena itu seyogyanyalah kita mengutamakan cara “pondok sistem”, berdasarkan hidup kekeluargaan, untuk mempersatukan pengajaran pengetahuan dengan pengajaran budi pekerti, sistem mana dalam sejarah kebudayaan bangsa kita bukan barang asing. Dahulu bernama “asrama”, kemudian di zaman Islam menjelma jadi “pondok pesantren”.

Pengajaran pengetahuan adalah sebagian dari pendidikan, yang terutama dipergunakan untuk mendidik pikiran; dan ini perlu sekali, tidak saja untuk memajukan kecerdasan batin, namun pula untuk melancarkan hidup pada umumnya. Seyogyanyalah pendidikan pikiran ini dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dan selebar-lebarnya, agar anak-anak kelak dapat membangun peri kehidupannya lahir dan batin dengan sebaik-baiknya.

Pendidikan jasmani yang pada zaman dahulu kala juga tidak asing, harus dipertimbangkan untuk kesehatan diri sendiri dan untuk mendapatkan keturunan yang kuat.

TENTANG KEBUDAYAAN

Kebudayaan, yang berarti buah budi manusia, adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat), dalam perjuangan mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai-bagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

1. Sebagai buah perjuangan manusia yang berada di dalam satu alam dan satu zaman, maka kebudayaan itu selalu bersifat kebangsaan (nasional) dan mewujudkan sifat atau watak, yakni kepribadian bangsa. Dan inilah sifat kemerdekaan kebangsaan dalam arti kultural.
2. Tiap-tiap kebudayaan menunjukkan indah dan tingginya adab kemanusiaan pada hidupnya masing-masing bangsa yang memilikinya; dalam hal ini keluhuran dan kehalusan hidup manusia selalu dipakainya sebagai ukuran.
3. Tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap segala kekuatan alam dan zaman, selalu memudahkan dan melancarkan hidup serta memberi alat-alat baru untuk meneruskan kemajuan hidup; sedang memudahkan serta memajukan berarti pula memfaedahkan dan mempertinggi hidup.

Hidup tumbuhnya kebudayaan, sebagai buah budi manusia, kebudayaan tidak terluput dari segala kejadian dan tabiat yang ada pada hidup manusia:

1. Lahir, bertumbuh, maju, berkembang, berbuah, sakit, menjadi tua, mundur dan mati.
2. Kawin dan berketurunan:
 - a. Secara "asosiasi", yakni berkumpul tetapi tidak bersatu, kerap kali menurunkan *bastaard*, yakni bersifat campuran dan kadang-kadang menunjukkan kemunduran atau dekadensi.
 - b. Secara "asimilasi", yakni bersatu padu atau *manunggil* dan biasanya menurunkan "angkatan baru yang murni"
3. Mengalami seleksi: apa yang kuat terus hidup, yang lemah mati. Setelah hukum evolusi lain-lainnya tak dapat dihindari di dalam hidup kebudayaan.

Maka kebudayaan (*cultural, cultivate, colere*) ialah memelihara serta memajukan hidup manusia ke arah keadaban. Dalam pada itu termasuk pula pengertian "memuja-muja" (*cultus, vereering*) dan inilah yang kerap kali menyebabkan hidup bekunya (*verstaaring*) kebudayaan. Karena itu haruslah selalu diingat:

1. Pemeliharaan kebudayaan harus bermaksud memajukan dan menyesuaikan kebudayaan dengan tiap-tiap pergantian alam dan zaman.
2. Karena pengasingan (isolasi) kebudayaan menyebabkan kemunduran dan matinya, maka harus selalu ada hubungan antara kebudayaan dengan kodrat dan masyarakat.
3. Pembaruan kebudayaan mengharuskan pula adanya hubungan dengan kebudayaan lain yang dapat mengembangkan (memajukan, menyempurnakan) atau memperkaya (yakni menambah) kebudayaan sendiri.
4. Kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan sendiri (*kontinuitet*) menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia (*konvergensi*) dan tetap terus mempunyai sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia (*konsentrisitet*).

Kebudayaan Indonesia yang sekarang masih berupa berkumpulnya segala kebudayaan untuk seluruh rakyat.

1. Berhubung dengan tetap adanya kesatuan alam dan zaman, kesatuan sejarah (dulu dan sekarang), kesatuan masyarakat dan lain-lainnya, maka kesatuan kebudayaan Indonesia hanya soal waktu.

2. Sebagai bahan untuk membangun kebudayaan kebangsaan Indonesia perlulah segala sari-sari serta puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di seluruh daerah Indonesia dipergunakan untuk menjadi modal isinya.
3. Dari luar lingkungan kebangsaan perlu pula diambil bahan-bahan yang dapat memperkembangkan dan/atau memperkaya kebudayaan kita sendiri.
4. Dalam memasukan bahan-bahan, baik dari kebudayaan daerah-daerah maupun dari kebudayaan asing, perlu senantiasa diingat syarat-syarat kontinuitas, *konvergensi* dan konsentrisitas tersebut di muka.
5. Jangan dilupakan, bahwa kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik, tetapi harus berarti pula kesanggupan dan kemampuan mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa, yakni kekhususan dan kepribadian dalam segala sifat hidup dan penghidupannya, di atas dasar adab kemanusiaan yang luas, luhur dan dalam.

Sekianlah Saudara Ketua, kata sambutan kami atas uraian Presiden Universitas Sdr. Prof. Dr. Sardjito. Pidato kami tadi semata-mata berwujud dan-rede, tetapi kami maksudkan sebagai penjelasan dan sementara tambahan yang perlu-perlu, supaya para anggota Senat, Dewan Kurator, para Guru Besar dan Dwijawara lainnya, pula para Sarjana dan Peserta didik Universitas dapat mengetahuinya. Jika ada perkataan-perkataan yang janggal, kami minta maaf sebanyak-banyaknya.

Saya tutup kata penyambutan kami ini dengan sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kemurahan hati Senat Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada kami. Kepada Saudara Prof. Dr. Sardjito pula saya menyatakan rasa penghargaan yang sedalam-dalamnya untuk pidatonya yang telah beliau ucapkan secara tulus ikhlas tadi.

Semoga Tuhan membalas segala budi baik itu.

-----0000-----